PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA -- KABUPATEN PIDIE
2026 /NO. 1, 43 HLM.
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN PIDIE

ABSTRAK - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 54 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; Permendagri No. 37 Tahun 2018; Permendagri No. 118 Tahun 2018; Permendagri No. 23 Tahun 2024; Pergub Aceh No. 5 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai maksud, tujuan, cara, jenis, ruang lingkup, serta kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa di lingkungan BUMD agar pelaksanaan pengadaan efisien, efektif, transparan, bersaing, adil, dan akuntabel.
- Pengadaan Barang/Jasa BUMD adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh BUMD yang dibiayai dari anggaran BUMD mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima hasil pekerjaan. Jenis pengadaan meliputi pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya yang dilaksanakan melalui swakelola maupun penyedia.
- Mengatur ketentuan khusus terkait penanganan keadaan darurat, pencadangan paket untuk Usaha Kecil/Mikro (hingga nilai paket tertentu), kewajiban penggunaan Produk Dalam Negeri (TKDN + BMP minimal 40%), pengadaan berkelanjutan, serta penyelenggaraan pengadaan secara elektronik (SPSE, E-marketplace, Katalog Elektronik, Toko Daring).
- Mengatur fungsi pengawasan internal oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan pengawasan oleh Bupati melalui Inspektorat Kabupaten Pidie, mekanisme penanganan pengaduan masyarakat, sanksi bagi penyedia maupun pelaku pengadaan, serta kewajiban BUMD memberikan pelayanan hukum bagi pelaku pengadaan yang menghadapi tuntutan hukum.

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 Januari 2026, ditetapkan pada tanggal 9 Januari 2026.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pidie dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Lamp. 5 hlm.